

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Syarif Hidayatullah, Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi menjadi empat periode yang terdiri dari masa demokrasi parlementer periode 1945 – 1959 , masa demokrasi terpimpin periode 1959-1965, masa demokrasi pancasila periode 1965-1998, dan masa demokrasi periode reformasi (Purnamawati, 2020). Demokrasi pancasila merupakan karakteristik dari periode reformasi, yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang lebih demokratis dan terjadi putaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah (Purnamawati, 2020). Pada periode tersebut pemilihan umum mulai dilaksanakan secara terbuka untuk melakukan rekrutmen politik yang bertujuan mengisi jabatan politik dalam pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia biasanya dijuluki pesta rakyat, yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih Presiden dan anggota Legislatif. Pemilihan umum pertama kali diadakan pada tahun 1955. Sejak tahun 1997 pasca era reformasi, tingkat partisipasi rakyat untuk melaksanakan pemilihan umum mengalami penurunan. Pada tahun 1997, tingkat partisipasi pemilih mencapai 93,6%, pada tahun 2009 pada pemilihan anggota legislatif partisipasi pemilih menjadi 70,9%, pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih sebesar 71,7% dan pada tahun 2014 pada pemilihan umum presiden partisipasi rakyat hanya mencapai 69,58% (Juanita 2020).

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum dapat mempengaruhi proses berjalannya demokrasi. Apalagi menjelang pemilihan umum 2024, terdapat isu yang tidak sedap muncul dan dapat mengubah perspektif masyarakat terhadap pemilihan umum. Isu tersebut adalah kabar mengenai penundaan pemilihan umum. Menurut berita CNN Indonesia, pengadilan negeri Jakarta telah memerintahkan KPU untuk menunda pemilihan umum ke tahun 2025 dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut bermula pada partai prima yang merasa telah dirugikan oleh pihak KPU karena pihak KPU tidak meloloskan partai prima menjadi peserta

pemilihan umum 2024. Atas alasan tersebut, partai prima mengajukan tuntutan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penundaan pemilihan umum akan menimbulkan dampak adanya inkonstitusional yang merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi dan menghapus semangat reformasi yang tertuang pada amandemen UUD 1945 (Fitriana and Budyatmojo n.d.). Pemilihan umum seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali hal tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Isu penundaan pemilihan umum telah mendapat banyak respon penolakan oleh sekelompok mahasiswa, beberapa guru besar, politikus meski begitu masih terdapat kelompok masyarakat yang turut mendukung isu penundaan pemilihan umum 2024.

Respon masyarakat terkait isu-isu terkini yang mencakup isu seputar penundaan pemilihan umum 2024 banyak dituangkan dalam media social. Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat salah satunya adalah Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang tergolong sebagai media alternative dan tercatat sejak oktober 2023, pengguna twitter di Indonesia mencapai 27 juta pengguna. Dalam Twitter terdapat sebuah informasi yang terdiri dari pesan 140 karakter yang disebut dengan tweet (Zukhrufillah, 2018). Isu terhadap penundaan pemilihan umum 2024 menimbulkan pendapat yang pro dan kontra di masyarakat sejak bulan Maret 2023. Terdapat sekelompok masyarakat yang mendukung adanya isu penundaan pemilihan umum 2024, namun juga terdapat masyarakat yang menolak adanya isu penundaan pemilihan umum 2024 tersebut. Isu terkait penundaan pemilihan umum 2024 hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat termasuk warga internet (warganet). Isu tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup besar di masyarakat. Dampak yang akan timbul akibat isu tersebut seperti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunnya antusias masyarakat terhadap datangnya pemilihan umum sebagai pesta rakyat. Respon masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan masalah tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemilihan umum, terdapat teknologi yang dapat membobotkan nilai persentase pro dan kontra. Teknologi tersebut memanfaatkan teknik TF-IDF (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*) sebagai pembobotan kata untuk mengubah sumber kata menjadi bentuk numeric dan mencari kata yang sering muncul pada suatu dokumen. Dengan menerapkan TF-IDF dapat memperbesar tingkat *accuracy* dan mempermudah proses selanjutnya dengan menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM). Metode *Support Vector Machine* (SVM) adalah sebuah teknik supervised learning dengan tingkat presisi, *accuracy* dan kualitas yang tinggi (Nurhafida and Sembiring, 2022). Metode tersebut berfungsi untuk mengklasifikasikan respon masyarakat kedalam beberapa kelas yaitu kelas dengan opini positif, atau negatif. Metode ini bekerja dengan cara memasukkan konsep kernel pada ruang berdimensi tinggi, dan mencari *hyperplane* dan memaksimalkan margin antara kedua kelas atau lebih untuk memperoleh data hasil klasifikasi yang akurat.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, oleh (Tineges,dkk, 2020) yang berjudul analisis sentimen terhadap layanan indihome berdasarkan twitter dengan metode klasifikasi *Support Vector Machine* (SVM). Pada penelitian tersebut didapatkan hasil *accuracy* sebesar 87%, *precision* 86%, *recall* 95%, dan error rate 13%. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Rofqoh dkk) yang berjudul analisis sentimen tingkat kepuasan pengguna penyedia layanan telekomunikasi seluler Indonesia pada twitter dengan metode *Support Vector Machine dan Lexicon Based Features* menghasilkan tingkat *accuracy* tanpa *Lexicon Based Features* sebesar 84%.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengelompokkan opini masyarakat mengenai isu penundaan pemilihan umum 2024. Sehingga dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut suara rakyat. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat terhadap pemilihan umum yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengambilan dan pengolahan data mengenai isu penundaan pemilihan umum 2024 dari media twitter?
2. Bagaimana implementasi metode *Support Vector Machine (SVM)* dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum 2024 dalam media *twitter*?
3. Bagaimana hasil *accuracy* dari penerapan metode *Support Vector Machine (SVM)* dalam melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum 2024 dalam media *twitter*?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pengambilan data dan pengolahan data mengenai isu penundaan pemilu 2024 dalam media twitter.
2. Mengetahui cara implementasi metode *Support Vector Machine (SVM)* dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dalam media *twitter*.
3. Mengetahui nilai hasil *accuracy* dari penerapan metode *Support Vector Machine (SVM)* dalam melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dalam media *twitter*.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dan tanggapan masyarakat terhadap isu penundaan pemilihan umum 2024.
2. Membangun aplikasi berbasis website yang dapat mengklasifikasi sentimen masyarakat ke dalam kategori positif, atau negatif. Serta mengimplementasikan wawasan peneliti dalam bidang teknologi informasi.

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan opini masyarakat mengenai pemilihan umum.